

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Mohamad Wahyudi (2009) beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan berkaitan dengan topik yang serupa antara lain: Kurangnya kemampuan dalam menggunakan informasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan UKM untuk mengembangkan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendidikan manajer/pemilik, skala usaha, masa memimpin perusahaan, umur perusahaan dan pelatihan akuntansi manajer/pemilik terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah UKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan Simple Random Sampling (acak) berjumlah 80 orang pimpinan atau pemilik usaha menengah di Bantul Yogyakarta dengan tingkat kesalahan 5%. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para manaje/pemilik usaha kecil dan menengah in Kasongan Bantul Yogyakarta. Data data tersebut sebelum dianalisis telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian

menunjukkan, pendidikan manajer/pemilik, skala usaha, berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Yogyakarta. Masa memimpin perusahaan, umur perusahaan dan pelatihan akuntansi manajer/pemilik tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Yogyakarta.

Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam mengukur besarnya pendapatan perusahaan sehingga menggolongkan menjadi skala usaha kecil, menengah, besar, melihat apakah ada pengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM di Yogyakarta. Perbedaan dari penelitian ini melihat pengaruh terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang SAK ETAP terhadap BPR

2. Sanyoto Rachmat (2006) yang berjudul Analisis Kondisi Lingkungan (*Control Environment*) Dalam Sistem Pengendalian *Intern* Bank BTN. Penelitian ini mengenai analisis kondisi lingkungan di lihat dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap sistem pengendalian *intern* salah satunya dari sumber daya manusia (SDM). Peneliti menjelaskan kebijakan dan praktek yang menyangkut personel suatu entitas sangat memperhatikan kemampuan ini. Kebijakan dan praktek seperti itu berkaitan dengan mempekerjakan, melatih, mengevaluasi, mempromosikan, dan mengkompensasi karyawan serta memberikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya (*Guy et al, 2002*).

Persamaan dengan penelitian ini adalah seberapa besar perusahaan memperhatikan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki dalam

menghadapi tugas – tugas yang diberikan. Perbedaan dari variabel terikat dan tidak terikat yang digunakan peneliti

3. Penelitian Zhou (2010) yang berjudul *the research on issue and countermeasures of accounting information of SMEs* mengungkapkan bahwa di Negara Cina yang fokus pada pengembangan informasi akuntansi adalah perusahaan-perusahaan dengan skala besar. Sedangkan sebagian besar UKM belum melakukan pengembangan informasi akuntansinya. Padahal di Negara tersebut, peran UKM sangat signifikan bagi sektor pembangunan ekonomi. Masalah utama yang dihadapi oleh UKM dalam pengimplementasian informasi akuntansi diantaranya software-software yang ada kurang sesuai dengan situasi yang sebenarnya dihadapi UKM, para pelaku usaha kurang memperhatikan pentingnya informasi akuntansi, tidak mampu mengevaluasi informasi akuntansi yang dijalankannya, karena mereka tidak memiliki pengetahuan akan informasi akuntansi.

Persamaan dengan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengimplementasikan informasi akuntansi dengan baik dan benar. Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada berbeda Negara dan sampel yang akan di teliti. Fokus penelitian signifikan terhadap sektor pembangunan ekonomi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Personaliti

Apakah yang dimaksudkan dengan personaliti? Persoalan ini kerap kali ditanya oleh seseorang apabila membincangkan mengenai personaliti. Adakah personaliti ini mempunyai kaitan dengan tingkah laku manusia ? Dalam tajuk personaliti ini kami akan membincangkan mengenai konsep personaliti yang sebenar berdasarkan daripada pendapat-pendapat beberapa ahli psikologi yang terkenal seperti Alder, Crow and Crow dan sebagainya. Selain itu kami akan mengkaji mengenai perbezaan di antara personaliti, watak dan trait. Disini kita akan mengetahui sama ada personaliti, watak dan trait adalah berbeza ataupun merupakan satu konsep yang sama. Personaliti juga dapat diklasifikasikan kepada tiga kumpulan yang utama iaitu ekstrovert, introvert dan ambivert yang juga akan dibincangkan di dalam tugas ini.

Kami juga akan melihat mengenai teori psikoanalisis yang telah diasaskan oleh Sigmund Freud (1856) dan membincangkan mengenai perkembangan personaliti berdasarkan teori psikoanalisis serta aplikasi teori ini di dalam bilik darjah dimana semua guru harus mempraktikkannya. Kami juga akan membincangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti dan bagaimanakah faktor-faktor ini mempengaruhi personaliti seseorang?. Aspek terakhir yang akan dikaji didalam tugas ini adalah mengenai pengaruh personaliti terhadap

pembelajaran serta bagaimana cara guru melayani personaliti murid yang berbeda.

Diharapkan, kajian ini sedikit sebanyak dapat memberikan pemahaman terhadap konsep personaliti yang sebenar serta diharapkan kajian ini juga dapat membantu bakal pendidik untuk mengaplikasikan konsep personaliti ini didalam proses pembelajaran agar falsafah pendidikan kebangsaan dapat diteruskan untuk generasi yang akan datang.

Hubungan dengan teori persoanaliti dengan pemahaman SAK-ETAP sebagai variabel terikat adalah perolehan data primer yang di lakukan dengan cara penyebaran kuisioer ke BPR Surabaya dan Sidoarjo yang diarahkan kepada bagian Manajer keuangan.

2.2.2 SAK-ETAP

Ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah sesuai dengan judulnya yaitu dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dalam SAK ETAP paragraf 1.1 (IAI, 2009) mengungkapkan yang dimaksud dengan entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan entitas yang:

- a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
- b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Paragraph 1.2 lebih memperjelas lagi yang termasuk dalam entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan, jika:

- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pertanyaan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau
- b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pension, reksa dana dan bank investasi.

SAK ETAP berlaku efektif per 1 Januari 2011, seperti yang diungkapkan dalam paragraph 30.1 (IAI, 2009). Namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP, kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP.

Apabila SAK ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Perbedaan dapat dilihat dari ketebalan SAK ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan menyajikan 30 bab.

Iman dan Tri (2009) mengungkapkan kebijakan akuntansi SAK ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK ETAP ini cukup ketat. Pada BAB 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni 1 January 2011, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Oleh sebab itu per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK-ETAP.

Selanjutnya ketentuan transisi juga menjelaskan bahwa entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK ETAP pada tahun 2011, namun kemudian mendaftarkan menjadi perusahaan publik di tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan

berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali. Sebaliknya, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan.

2.2.3 Regulasi Akuntansi dan Teori Yang Berhubungan

Terdapat tarik-menarik yang sangat kuat antara pihak yang setuju dengan yang tidak setuju terkait dengan apakah diperlukan regulasi terhadap standar akuntansi keuangan. Pihak yang tidak menginginkan regulasi berargumen dengan menggunakan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa manajemen memiliki insentif membuat laporan yang andal dan disajikan secara sukarela kepada pemilik (*shareholder*) semata-mata untuk menyelesaikan konflik antara pemilik dan manajemen. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor hubungan kerja (hubungan keagenan) serta untuk menilai dan menentukan kompensasi yang akan dibayarkan kepada manajer (Belkaoui, 2007). Perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan secara sukarela dan pengguna informasi dapat memaksa pihak-pihak terkait untuk menyajikan informasi tersebut.

Di samping menggunakan teori keagenan, pihak yang tidak menginginkan regulasi juga menggunakan pendekatan pasar bebas. Menurut pendekatan ini informasi akuntansi merupakan produk-produk yang bersifat ekonomis, sama seperti barang atau jasa lainnya. Informasi akuntansi juga merupakan subjek kekuatan permintaan dari para pengguna dan disediakan oleh para penyaji. Hasilnya adalah sejumlah pengungkapan informasi yang optimal pada tingkat harga yang optimal pula. Kapan suatu informasi diperlukan dan sejumlah harga tertentu ditawarkan untuk itu, maka pasar akan menyediakan informasi asalkan harga yang ditawarkan melebihi biaya informasi tersebut. Pihak-pihak yang menginginkan regulasi akan menggunakan teori kepentingan publik (*The Public Interest Theory*) dan teori kepentingan kelompok (*The Interest Group Theory*) untuk menyukseskan keinginannya karena pada dasarnya, baik kegagalan pasar maupun kebutuhan untuk mencapai tujuan sosial memaksa adanya regulasi akuntansi (Scott, 2000). Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, adanya penyelewengan informasi, dan penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya. Dalam teori ini, sentral otoritas juga disebut regulator dan diasumsikan bahwa masyarakat memiliki kepentingan terbesar pada informasi akuntansi.

Regulator berusaha untuk melakukan pengaturan dengan sebaik mungkin karena akan memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dalam penerapannya teori kepentingan publik ternyata memiliki masalah sehingga teori ini dikatakan memiliki masalah implementasi karena sulit menentukan berapa jumlah regulasi yang sesuai. Penentuan jumlah regulasi merupakan sesuatu yang sulit dilakukan untuk komoditas seperti informasi. Masalah yang lebih sulit terletak pada motivasi dari regulator itu sendiri. Harus di sadari bahwa sangat sulit untuk memonitor operasi pengawasan dan kekuatan publik untuk memaksa regulator beroperasi demi kepentingan publik adalah lemah. Kelemahan tersebut juga akan menimbulkan kemungkinan bahwa badan ini akan beroperasi untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk kepentingan umum. Teori kepentingan kelompok memiliki pandangan bahwa suatu industri beroperasi karena terdapat sejumlah kepentingan kelompok. Otoritas politik atau legislatif juga dapat digolongkan sebagai suatu kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan untuk memasok regulasi untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh sebab itu, teori ini memiliki pandangan bahwa regulasi adalah suatu komoditas di mana terdapat penawaran dan permintaan. Komoditas akan dialokasikan kepada para konstituen dengan efektif secara politis dan dengan meyakinkan legislatif memberikan bantuan regulasi kepadanya. Kebutuhan untuk mencapai tujuan sosial dan adanya kegagalan pasar merupakan bentuk alasan yang digunakan untuk mendukung perlunya regulasi dalam akuntansi keuangan. Tujuan sosial mencakup kewajiban

laporan keuangan, keseimbangan informasi yang disajikan (*information symmetry*), dan perlindungan terhadap para investor. Kegagalan pasar dibedakan menjadi kegagalan secara eksplisit dan kegagalan secara implisit dalam pasar informasi swasta. Kegagalan pasar eksplisit terjadi dalam pasar khusus informasi akuntansi karena kuantitas dan kualitas informasi akuntansi berbeda dari manfaat sosial maksimum yang dapat diperoleh. Dalam hal ini informasi akuntansi dipandang sebagai barang umum dan terkait dengan ketidakmampuan untuk mengeluarkan pihak yang terlibat dalam penjualan informasi (*free rider*). Teori kegagalan pasar secara implisit menekankan pada satu kondisi atau lebih sehingga terdapat gangguan dalam pasar informasi akuntansi. Kondisi yang dimaksud, yaitu monopoli manajemen dalam menyediakan dan mengendalikan informasi, investor yang naif, adanya *functional fixation* dalam proses pengambilan keputusan investor, angka-angka akuntansi yang tidak memiliki arti ekonomis, beragamnya prosedur akuntansi, dan tidak adanya objektivitas (Watts dan Zimmerman, 1986). Leftwich (1980) dalam Watts and Zimmerman (1986) menggunakan *earnings market hypothesis* (EMH) sebagai dasar untuk membantah keenam alasan yang dianggap sebagai pengganggu dan merupakan penyebab terjadinya kegagalan pasar. Dalam ilmu ekonomi, pasar dianggap gagal apabila kuantitas atau kualitas produk yang diproduksi dalam sebuah pasar yang bebas berbeda dari kuantitas atau kualitas yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks akuntansi, kegagalan pasar terjadi jika informasi diproduksi dalam jumlah di bawah

atau di atas jumlah optimal kegagalan pasar secara eksplisit. Dengan menggunakan argumen Leftwich (1980), Watts and Zimmerman (1986) menolak asersi bahwa regulasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar. Salah satu argumen ini menyatakan bahwa kegagalan pasar tidak terjadi. Di samping itu, alasan kegagalan pasar secara implisit mengasumsikan bahwa perumus regulasi mengutamakan kepentingan sosial. Watts and Zimmerman (1986) menyatakan bahwa asumsi ini tidak deskriptif tidak sesuai dengan kenyataan dan menyarankan untuk meneliti masalah regulasi dengan asumsi bahwa tiap-tiap perumus regulasi berusaha memaksimalkan kemakmurannya masing-masing. Asumsi ini digunakan pula untuk menjelaskan perilaku manajer, terutama ketika melakukan perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempengaruhi arus kas.

2.2.4 Definisi dan Pengertian BPR

1. Definisi

Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum

BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Fungsi BPR Penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tujuan BPR Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sasaran BPR Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon). Asas BPR Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (free fight liberalism, etatisme, dan monopoli).

2. Pengertian

1. BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

2. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.5 Kegiatan Usaha BPR

a. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu memberikan kredit, Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.

b. Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh BPR

Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia), Melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada butir a.

2.2.6 Permasalahan Penerapan SAK-ETAP Terhadap PA-BPR

Walaupun PA-BPR disusun mengacu pada PAPI 2001 sehingga tidak terdapat perubahan yang signifikan, namun masih terdapat praktekpraktek di lapangan yang belum sesuai dengan PAPI 2001. Pengakuan provisi kredit – diamortisasi. PAPI 2001 memberikan pertimbangan materialitas. Banyak praktek mengakui secara langsung, atau menetapkan batasan materialitas terlalu tinggi (2009 Industri: pendapatan provisi = 30% darilaba sebelum pajak) Biaya biaya pendirian (pra operasional) dibebankan langsung dalam periode berjalan. Masih banyak BPR memiliki beban ditangguhkan dan diamortisasi. (Materi Kongres XI IAI – 1)

2.2.7 Faktor yang mendasari pemahaman SAK-ETAP

Faktor yang diduga mempengaruhi berhasil tidaknya pemahaman SAK-ETAP antara lain:

2.2.7.1 Hubungan skala usaha dengan pemahaman SAK-ETAP

Skala usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi (Mohamad Wahyudi, 2006). Holmes and Nicholls (1988) mengemukakan bahwa tingkat informasi akuntansi yang disediakan tergantung pada skala usaha yang diukur dengan perputaran dan jumlah karyawan. Perusahaan didirikan untuk tujuan dapat menjaga kelangsungan usahanya. Perusahaan yang berkembang ditandai dengan perubahan aset dan jumlah karyawannya.

2.2.7.2 Hubungan sumber daya manusia dengan pemahaman SAK-ETAP

Kebijakan dan praktek yang menyangkut personel suatu entitas sangat memperhatikan kemampuan ini. Kebijakan dan praktek seperti itu berkaitan dengan memperkerjakan, melatih, mengevaluasi, mempromosikan dan mengkompensasi karyawan serta memberikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya (Sanyoto, 2006). Kebijakan dan praktek sumber daya manusia menyampaikan pesan kepada karyawan mengenai tingkat integritas, perilaku etis dan

kompetensi yang diharapkan. Mulai dari *rekrutment*, *training*, evaluasi, promosi dan kompensasi sampai tindakan indisipliner akan mempengaruhi kualitas lingkungan pengendalian. Penerimaan pegawai yang menekankan pada pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, prestasi, bukti integritas dan perilaku etis menunjukkan komitmen pada orang yang jujur dan kompeten. Kebijakan *training* adalah untuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab yang akan diemban. Program kompensasi berupa insentif/bonus adalah untuk memotivasi dan mendukung kinerja unggul. Tindakan disiplin adalah untuk menyampaikan pesan bahwa pelanggaran terhadap standar perilaku tidak akan ditolerir. Penugasan pegawai yang berkompeten dan *on-time training* saja belum cukup.

2.2.7.3 Hubungan teknologi informasi akuntansi dengan pemahaman SAK-ETAP

Pengimplementasian informasi akuntansi juga mengalami hambatan-hambatan (Zhou, 2010) antara lain:

1. Software yang digunakan tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya dihadapi oleh UKM. Mereka mengalami kesulitan untuk menemukan software yang dibutuhkan, karena para pengembang teknologi informasi tidak membuat software khusus untuk UKM.
2. Para pelaku usaha kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan informasi akuntansi usahanya. Mereka lebih memfokuskan diri bagaimana usahanya dapat terus berjalan.

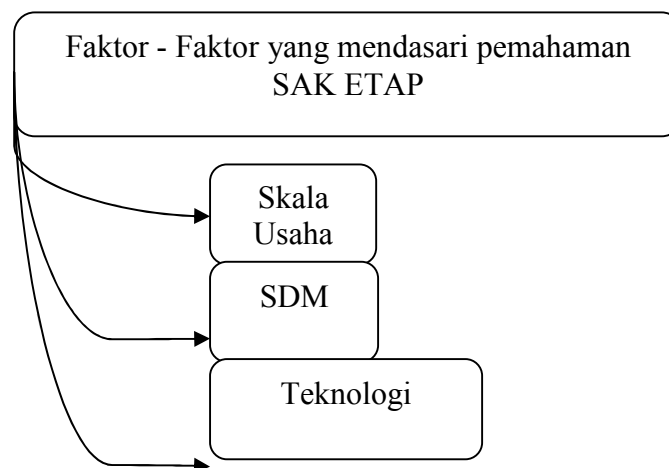
3. Para pelaku usaha tidak dapat mengevaluasi informasi akuntansi secara benar dan obyektif.
4. UKM masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang memadai akan informasi akuntansi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dalam pemilihan jurusan perlu di pertimbangkan faktor-faktor yang mendukung keputusan. Berdasarkan teori dan rumusan masalah diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran dan bentuk model sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar di atas, maka kerangka pemikiran tersebut dapat digunakan sebagai faktor- faktor yang dijadikan sebagai landasan pemahaman SAK ETAP di Bank Perkreditan Rakyat Surabaya dan Sidoarjo.